

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dasar dari pembangunan suatu negara adalah untuk mewujudkan kemakmuran Masyarakat dan mengubah perekonomian menjadi lebih baik. Dalam proses pembangunan dapat melibatkan berbagai dimensi kehidupan antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan pendapatan dan penurunan kemiskinan (Kristiana et al., 2019). Namun, adanya peningkatan pertumbuhan penduduk, ketimpangan pendapatan, angka pengangguran yang meningkat dan tingginya tingkat kemiskinan menjadi permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu yang menjadi masalah dalam negara maju maupun negara berkembang adalah kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Menurut BPS pula bahwa kemiskinan adalah kondisi seseorang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2100 kalori perkapita per hari. Di Jawa Timur masih banyak penduduk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Masih banyak penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan makan mereka secara maksimal. Hal tersebut dapat dikarenakan pendapatan yang mereka miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Atau bisa juga karena mereka tidak memiliki pendapatan yang bisa dibelanjakan untuk kebutuhan mereka.

Berdasarkan data informasi kemiskinan dari BPS, di Jawa Timur pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 4,96 juta jiwa atau 13,08% dari total penduduk Jawa Timur. Sedangkan pada 2013 memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 4,85 juta jiwa atau 12,73% dari total penduduk Jawa Timur. Jika dibandingkan tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,35%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Provinsi lain yang dekat dengan Jawa Timur seperti Jawa Tengah dan DI Yogyakarta penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur paling kecil. Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 0,54% dan DI Yogyakarta mengalami penurunan sebesar 0,85%. Hal tersebut menggambarkan bahwa Jawa Timur masih memiliki masalah penduduk miskin yang harus diselesaikan.

Kemiskinan merupakan tema sentral dari perjuangan bangsa, sebagai inspirasi dasar dan perjuangan akan kemerdekaan bangsa, dan motivasi fundamental dari cita-cita menciptakan masyarakat adil dan makmur (Salim, 1982). Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat perlindungan, air minum, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari moral dan evaluatif, sementara yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Masalah yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun yaitu, kemiskinan. Dihampir semua negara

berkembang, standar hidup dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah, jika dibandingkan dengan standar hidup orang-orang di negara kaya, atau dengan golongan elit di negara mereka sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut terwujud salah satunya dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah atau kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan diri para miskin. Berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan tersebut disebabkan baik faktor internal maupun eksternal yang membelenggu, seperti adanya keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri, dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan.

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya dapat disebabkan oleh salah satunya adalah sulitnya memenuhi kebutuhan dasar. Dewasa ini, kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dihadapkan pada permasalahan kemiskinan yang cukup besar jumlahnya, maka upaya-upaya pemerataan pendapatan masyarakat perlu dilakukan secara terus menerus melalui berbagai bidang kehidupan masyarakat, agar mereka yang tergolong “miskin” ini setidaknya memiliki kemampuan guna memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok yang dimaksud sebagai kebutuhan dasar, yakni kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang menyangkut kebutuhan konsumsi individu (maka, perumahan, pakaian), maupun keperluan pelayanan sosial tertentu seperti air minum, sanitasi,

transportasi, kesehatan dan pendidikan. Dalam kaitan ini, Radwan dan Alftan (1978) mengemukakan bahwa tanpa mengurangi konsep basic needs, keperluan minuman dari seorang individu atau rumah tangga berupa makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, transportasi dan partisipasi. Tingkat kesejahteraan atau taraf hidup diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok dasar manusia. Beberapa komponen yang termasuk dalam kebutuhan dasar atau pokok ini meliputi makanan, lapangan kerja, kesehatan, perumahan, Pendidikan, komunikasi, kebudayaan, penelitian dan teknologi, energi, hukum, dinamika politik dan implikasi idiologi (Soedjatmiko,1988). Selain itu, menurut Tjokrowinato (1987) Konferensi International Labor Organization (ILO) di Geneva Tahun 1976, dikemukakan bahwa konsep kebutuhan pokok dasar mencakup dua hal, yang pertama yaitu konsumsi minimum untuk keluarga, seperti pangan, sadang, papan, pendidikan, dan kesehatan, kedua adalah pelayanan negara (public services) untuk masyarakat pada umumnya, seperti air bersih, transportasi, listrik, dan sebagainya. Selain kualitas tingkat pemenuhan kebutuhan pokok, faktor pendidikan dan pekerjaan masyarakat juga dapat menjadi penyebab taraf kemiskinan meningkat. Sulitnya seseorang dalam memperoleh pendidikan akan menyebabkan seseorang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Seiring perkembangan zaman, lapangan kerja yang tersedia akan mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Jika dalam masa pendidikan banyak masyarakat yang tidak menempuh sebagaimana mestinya maka masyarakat tersebut akan mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan. Kesulitan mencari pekerjaan ini akan mengakibatkan seseorang kesulitan memperoleh pendapatan. Sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah yang akan bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Sebagaimana pembangunan di bidang lain, pendidikan menjadi salah satu bidang utama selain kesehatan dan ekonomi.

Pendidikan diakui secara luas bahwa memiliki peran sebagai pemimpin dalam instrumen pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pendidikan semakin dikembangkan. Beberapa tahun lalu pendidikan hanya dipusatkan pada pendidikan dasar dan menengah. Namun, saat ini pendidikan telah dikembangkan hingga pendidikan tinggi. Hal tersebut dilakukan karena pendidikan mampu memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan (Bloom, 2006). Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan baik di Negara Indonesia atau negara manapun dalam jangka panjang. Baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada waktunya akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 2010).

Menurut Gillis (2000) terdapat dua alasan mengapa pendidikan itu penting. Pertama karena banyak permintaan yang tinggi untuk pendidikan, hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang percaya bahwa pendidikan yang tinggi akan memberikan keuntungan bagi mereka. Kedua, karena banyak hasil observasi yang menyatakan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pendapatan dan status sosial di

masyarakat akan terangkat. Menurut Ihsan (2011) tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Tingkat pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Menurut Badan Pusat Statistik (2013) pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu jenjang pendidikan tertinggi seseorang yang ditandai dengan ijazah. Persentase pendidikan yang ditamatkan dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan yang digunakan untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja dengan menyesuaikan kualifikasi pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja di suatu wilayah. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga tingkat pendidikan dapat diartikan sebagai jenjang atau tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan perolehan ijazah.

Dalam proses penanganan masalah ekonomi pada arah pembangunan, peran pemerintah sangat penting dan dibutuhkan. Kebijakan pemerintah dapat dipandang dari sudut pengeluaran pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu subsidi. Subsidi merupakan bantuan pemerintah kepada perusahaan atau masyarakat yang bertujuan pemberian subsidi ini dapat mendorong produksi dan konsumsi yang lebih tinggi atau mendorong harga menjadi lebih rendah (Milton H. Spencer and Orley M. Amos (1993),

dalam Misdawita dan Arini, 2013:150). Subsidi dari pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan salah satunya adalah subsidi beras miskin dan subsidi Pendidikan untuk meningkatkan nilai SDM bangsa Indonesia

Dalam program beras untuk keluarga miskin (raskin) merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Tujuan raskin adalah untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui bantuan beras pada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dengan tingkat harga tertentu. Sedang sasaran raskin terbantunya dan terbukanya akses pangan keluarga miskin dengan bahan pangan pokok (beras), pada tingkat harga bersubsidi di tempat dan jumlah yang telah ditentukan dimana setiap kepala keluarga (KK). Melalui program tersebut yang didukung program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk dapat pemeratakan pendapatan masyarakat agar setidaknya mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Dengan kata lain bahwa kontribusi pembangunan dalam memberikan peluang terciptanya berbagai kesempatan kepada masyarakat dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan perlu diciptakan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya penciptaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun di sektor non formal dapat memberikan dorongan atau motivasi dalam berbagai bentuk menciptakan iklim perekonomian yang agak longgar atau dengan kata lain lebih

banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk meningkatkan prestasi usahanya, dan lain-lain. Salah satu upaya tersebut ialah implementasikannya kebijakan/program bantuan pangan untuk rakyat miskin yang dikenal dengan istilah Raskin atau Beras Untuk Rumah Tangga Miskin yang telah teruji dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya beli masyarakat, khususnya dikawasan pedesaan.

Dengan demikian, maka upaya peningkatan daya beli masyarakat perlu dilakukan secara terus menerus, atau dalam artinya bahwa pemerataan pendapatan dengan sendirinya akan bernampak positif pada peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan itu. Sigit (1983) mengemukakan bahwa pemerataan pendapatan antar penduduk/rumah tangga mengandung dua segi. Pertama, meningkatkan tingkat kehidupan mereka yang masih berada dibawah garis kemiskinan; kedua, pemerataan pendapatan secara menyeluruh, dalam arti mempersempit perbedaan-perbedaan tingkat pendapatan antara rumah tangga. Usaha memperkecil persentase kelompok ini bisa berakibat pada pembagian pendapatan yang lebih merata yaitu jika pendapatan golongan atas tidak melonjak naik lebih cepat. Tapi dua segi tersebut tidak perlu saling berhubungan. Peningkatan taraf hidup golongan bahwa tidak harus berakibat pada lebih meratanya distribusi pendapatan. Karena itu kedua-duanya harus diusahakan bisa dengan tekanan berbeda. Logisnya, menaikkan taraf hidup atau kesejahteraan golongan bahwa lebih dulu, karena problem ini menyangkut kebutuhan dasar mereka yang sangat dibutuhkan.

Menurunkan angka kemiskinan adalah salah satu tujuan dari pembangunan. Dengan pendidikan yang memadai, maka pembangunan nasional akan mudah dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Diharapkan dengan pendidikan akan mampu menjawab persoalan kemiskinan, rendahnya produktifitas dan juga lambatnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori efektivitas secara umum diartikan yaitu suatu keadaan yang dikehendaki dalam suatu perbuatan (Ensiklopedia Administrasi, (1982) dalam Gie (1992:117), dapat pula di artikan oleh Handayanigrat (1986:17) adalah apabila suatu tujuan atau sasaran telah tercapai sesuai dengan rencana. Dapat pula di artikan suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak di capai atau sasaran yang digunakan dan disertai dengan kemampuan yang di miliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat di capai dengan hasil yang memuaskan. Sedangkan menurut Siagian (2001:24) memberikan definisi bahwa efektifitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Berdasarkan teori efektivitas dan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut peneliti tertarik atas penelitian tentang adanya tindakan pemerintah dalam memberi subsidi raskin untuk pemenuhan kebutuhan dan subsidi Pendidikan untuk meningkatkan nilai SDM masyarakat Indonesia diharapkan memberikan pengaruh yang efektif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan judul “**PENGARUH SUBSIDI**

RASKIN DAN SUBSIDI PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN KOTA SURABAYA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh subsidi pendidikan terhadap kemiskinan dikota Surabaya?
2. Apakah ada pengaruh subsidi beras miskin terhadap kemiskinan di kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk Mengetahui apakah ada pengaruh subsidi Pendidikan terhadap kemiskinan di Kota Surabaya.
2. Untuk Mengetahui apakah ada pengaruh subsidi beras miskin terhadap kemiskinan di Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program Studi Ekonomi Pembangunan, fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bagi pengambil kebijakan, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh subsidi raskin dan subsidi pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di kota Surabaya.
3. Bagi akademis diharapkan akan menambah wawasan dan sebagai referensi dalam penelitian yang sejenisnya di masa mendatang.